



**Gambar 1.** Tampilan Aplikasi Pajak Daerah Sidoarjo  
 Sumber: <https://sie.pajakdaerah.sidoarjo.kab.go.id:440/login>

**Tabel 1.** Data Pengunjung Aplikasi Pajak Daerah Sidoarjo

No	Tahun	Jumlah Pengunjung
1.	2022	1.800
2.	2023	2.160
3.	2024	2.484

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo



**Gambar 2.** Sosialisasi BPPD Sidoarjo kepada masyarakat  
 Sumber: <https://sie.pajakdaerah.sidoarjo.kab.go.id>



**Gambar 3.** Rapat internal BPPD Sidoarjo  
 Sumber: <https://sie.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id>

**Tabel 2.** Komunikasi BPPD Sidoarjo dalam implementasi APDS

Jenis komunikasi	Bentuk kegiatan	Tujuan
1. Eksternal (Pemerintah → Masyarakat)	Media sosial (Instagram, Facebook, Website APDS)	Menyampaikan informasi terbaru mengenai cara penggunaan aplikasi, jadwal sosialisasi, dan pengumuman pajak daerah.
	Sosialisasi langsung ke desa	Memberikan edukasi personal dan praktik langsung bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan aplikasi.
2. Internal (Pemerintah → Aparatur)	Sosialisasi intensif untuk pegawai	Membekali petugas bagian pelayanan dengan pemahaman teknis APDS.
	Rapat koordinasi antarbagian	Menyelaraskan pemahaman, evaluasi kendala, dan tindak lanjut.

Sumber: diolah oleh penulis, 2025

**Tabel 3.** Aspek ketersediaan Sumber Daya

Aspek Sumber Daya	Bentuk dukungan	Jumlah
1. Sumber Daya Manusia (SDM)	- Pegawai bidang pelayanan	20 Orang
	- Pegawai bidang pengolahan data dan IT	14 Orang
	- Pegawai pengelola implementasi APDS	40 Orang
	- Pemeliharaan dan pengembangan APDS	1,5-2,5 miliar per tahun
2. Anggaran	- Sosialisasi dan pelatihan	300-500 juta pertahun
3. Sarana dan Prasarana	- Loker pelayanan pajak	10 Loker
	- Komputer/laptop	80 unit
	- Perangkat pendukung : printer, scanner, CCTV	50 unit
4. Infrastruktur Teknologi	- Server utama APDS	1 server pusat
	- Server cadangan / backup	1 server
	- Akses aplikasi APDS	1 web dan mobile
	- Jaringan internet kantor BPPD	1 jaringan utama dan backup

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Sidoarjo

**Tabel 4.** Disposisi pelaksana dalam implementasi APDS

Temuan	Bukti/Perilaku nyata
1. Komitmen pelaksana seperti pegawai mendukung penuh kebijakan APDS.	Membuka layanan panduan wajib pajak, mendampingi langsung di lapangan.
2. Tidak adanya resistensi dari pelaksana.	Pegawai tetap membuka layanan manual sementara, namun mengarahkan masyarakat ke APDS serta memberikan sosialisasi.
3. Dukungan partisipatif dengan pelaksana mendorong peran pemerintah.	Desa ikut serta dalam sosialisasi & edukasi penggunaan APDS.
4. Kepuasan pelaksana seperti pegawai merasa APDS mempermudah tugas.	Akses data lebih cepat, komunikasi dengan wajib pajak lebih lancar.

Sumber: diolah oleh penulis, 2025

**Gambar 4.** Struktur birokrasi BPPD Sidoarjo

Sumber: <https://sie.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id>

**Tabel 5.** Jumlah pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo

Unit kerja/bidang	Jumlah pegawai
1. Kepala BPPD	1 Orang
2. Sekertariat umum, keuangan, kepegawaian	18 Orang
3. Bidang pendataan dan penetapan pajak daerah	25 Orang
4. Bidang penagihan dan pengendalian	22 Orang
5. Bidang pelayanan dan penyuluhan	20 Orang
6. Bidang pengolahan data dan teknologi informasi	14 Orang

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

**Tabel 6.** SOP Implementasi APDS Sidoarjo

Tahapan SOP	Pelaksana	Proses/alur kegiatan	Output
1. Pendaftaran akun wajib pajak	Wajib Pajak, Admin APDS	Wajib pajak mengakses website APDS → mengisi data diri → verifikasi melalui email/WhatsApp	Akun aktif dan terdaftar
2. Login sistem	Wajib pajak	Menggunakan NIK dan password yang telah diverifikasi	Wajib Pajak dapat masuk ke dashboard APDS

3. Pengisian data objek pajak	Wajib pajak	Mengisi formulir objek pajak (tanah, bangunan, usaha, kendaraan)	Data objek pajak tersimpan dalam system
4. Verifikasi data	Admin APDS, Petugas Bidang Pajak	Mengecek kelengkapan & keabsahan data wajib pajak dan objek pajak	Data tervalidasi
5. Penetapan pajak	Kepala Bidang Pajak sesuai jenis pajak	Menetapkan besaran pajak yang harus dibayar sesuai aturan	Surat Ketetapan Pajak (SKP) terbit
6. Penerbitan kode billing	Sistem APDS	Sistem secara otomatis menghasilkan kode billing	Wajib pajak mendapat kode billing pembayaran
7. Pembayaran pajak	Wajib Pajak melalui Bank/Online Payment	Wajib pajak melakukan pembayaran pajak via bank, ATM, atau aplikasi e-channel	Pajak terbayar & tercatat di APDS
8. Konfirmasi pembayaran	Sistem APDS & Admin	Sistem mencatat status "Lunas" → Admin melakukan cross check bila ada kendala	Status pembayaran terupdate
9. Penerbitan bukti pembayaran	Sistem APDS	Sistem mengeluarkan e-Bukti Pembayaran (e-BP) yang bisa diunduh	Wajib pajak menerima bukti pembayaran digital

---

*Sumber: diolah oleh penulis, 2025*